



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI, SENIN 13 September 2023



RINGKASAN BERITA HARI INI

PEKAN OLAHRAHA PROVINSI (PORPROV) VIII JAWA TIMUR 2023 DI KABUPATEN SIDOARJO

Sumbang 15 Medali, Tim Cabor Berkuda Raih Juara Umum

KOTA-Tim cabang olahraga (cabor) berkuda Sidoarjo berhasil menjadi juara umum pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII 2023. Total cabor tersebut berhasil meraih 15 medali. Yakni, 8 emas 4 perak dan 3 perunggu.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Sidoarjo, Djoko Supriyadi bersyukur tim berkuda Kota Delta meraih hasil positif. Menurutnya, hal itu sangat membanggakan.

Tim berkuda, termasuk cabor yang diandalkan Kabupaten Sidoarjo dalam mendulang pundi medali. "Cabang olahraga



Tumbangkan Surabaya, Tim Voli Pantai Sidoarjo Raih Medali Emas

KOTA-Satu lagi medali emas berhasil diamankan kontingen Sidoarjo di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VIII 2023. Kali ini medali emas dipersembahkan oleh tim voli pantai putra Kota Surabaya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Sidoarjo tampil percaya diri. Tim Kota Delta tampil dengan perkasa. Mereka menang dua set langsung. Sehingga berhasil meraih medali emas di cabang olahraga tersebut.

Di set pertama, pasangan Danang Herliamban dan Wahyu Wijaya menang telak dengan



KETAT: Tim voli pantai putra Sidoarjo saat melawan

KPK-PPATK Jadi Pilot Project Gaji Tunggal

■ Korpri dan P2G Setuju selama Tidak Kurangi Kesejahteraan ASN

■ PPPK Bakal Dapat Pensiun, tapi Wajib Bayar Iuran Tiap Bulan

JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan skema *single salary* atau gaji tunggal

bagi negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan

Selama masih dicoba di KPK dan PPATK, tunjangan yang selama ini ada masih berlaku. Misalnya tunjangan kinerja. Karena untuk membedakan mana yang kerja dan yang tidak kerja. Daerah kemampuannya juga berbeda-beda."

ADDULLAH AZWAR ANAS



Bersihkan Gorong-Gorong di Bawah Perempatan Gedangan

Menteri Anas Pastikan Tak Ada Penghapusan Tenaga Honorer

Jakarta, Bhirawa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada penghapusan 2,3 juta tenaga honorer yang sebelumnya diusulkan akan dilakukan pada November 2023.

"Yang penting, nanti di November ini tidak akan ada PHK massal untuk 2,3 juta ini, karena kalau 2,3 juta ini ada pemberhentian seperti PP yang tadi, maka ini akan berdampak pada pelayanan publik dan lain-lain," ujar Azwar Anas di Kemmenko PMK, Jakarta, Selasa.

Azwar khawatir jika terjadi penghapusan honorer berdampak pada setiap aspek pelayanan, termasuk tingginya angka pengangguran. Ia menyebut banyak pegawai honorer yang melayani sektor-sektor vital pelayanan publik.

Kendati demikian, pemerintah tidak boleh mengangkat atau merekrut tenaga honorer baru. Ia pun telah berikhtisar surat kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.

"Nah formatnya seperti apa, akhirnya kita bahas RUU ASN bulan depan sudah bisa kita sahkan," kata dia.

Nantinya, di RUU ASN, pengangkatan ASN tidak hanya setahun atau dua tahun sekali, tetapi bisa kapan saja untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan, seperti pensiun.

"Jadi dengan demikian tak seperti itu, bila kosong, diisi honorer," katanya.

Ia bercerita selama ini banyak rekrutmen pegawai honorer yang berkualitas maupun tak berkualitas. Sehingga, ia memastikan bakal mengevaluasi soal honorer ke depannya.

"Terlepas dari rekrutmentnya dulu banyak ada yang berkualitas bagus, ada juga yang tidak berkualitas, maka nanti ini akan kita evaluasi," katanya. [ant]



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Istana Kepresidenan Jakarta

Beberapa Stan MPP Padat, Pemkab Bakal Evaluasi



PELAYANAN: Suasana masyarakat yang memanfaatkan layanan di MPP Sidoarjo.

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan evaluasi terhadap stan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang datang ke MPP.

Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatat bahwa beberapa stan pelayanan di MPP Sidoarjo mengalami kepadatan pengunjung setiap harinya. Seperti stan pelayanan dari Dispendukcapil dan Dinas Penanaman Modal. Kedua stan itu terus melayani masyarakat dengan intensitas tinggi.

Namun, ada juga stan pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal yang terbilang sepi. Alasan utamanya adalah keterbatasan petugas. Oleh karena itu, mereka meminta penambahan personil yang piker untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.

Kabag Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Arif Mulyono mengungkapkan bahwa MPP Sidoarjo dibangun dengan tujuan agar masyarakat Sidoarjo dan umum dapat memperoleh berbagai macam layanan publik secara lengkap di satu lokasi.

Hingga saat ini, MPP Sidoarjo menyediakan total 142 jenis layanan publik dari berbagai OPD dan instansi vertikal. Pemkab Sidoarjo memiliki 11 unit OPD, sedangkan instansi vertikal mencapai 13 unit.

Jumlah total petugas yang bertugas di MPP Sidoarjo mencapai 40 orang. Setiap stan layanan di MPP Sidoarjo memiliki minimal satu petugas, dengan maksimal hingga enam orang petugas.

Menurut dia, hingga saat ini ada 24 instansi masih aktif memberikan layanan di MPP Sidoarjo. Pihaknya berharap agar

semakin banyak instansi yang bergabung. "Sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang tersedia di satu tempat," katanya.

Pelayanan publik di MPP Sidoarjo dievaluasi setiap tahun sekali, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Selain MPP, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki 110 unit pelayanan publik lainnya, yang tersebar mulai dari tingkat OPD, kecamatan, Kelurahan, hingga Puskesmas. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (nis/vga)

Manfaatkan Lahan Fasum Jadi Produktif

REKODONG-Manfaatkan lahan fasum yang produktif. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lahan fasum yang sebelumnya hanya digunakan sebagai tempat pembuangan sampah, kini telah diubah menjadi lahan produktif yang dapat dimanfaatkan untuk pertanian dan peternakan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur di lahan-lahan fasum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lahan dan memudahkan akses masyarakat ke lahan-lahan tersebut.

Salah satu contoh lahan fasum yang telah dimanfaatkan secara produktif adalah lahan di Desa ... Lahan ini telah diubah menjadi lahan pertanian yang menghasilkan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Hal ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat, terutama dalam hal peningkatan pendapatan dan kesejahteraan.

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berharap dengan pemanfaatan lahan fasum yang produktif, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan berkontribusi bagi pembangunan daerah.



REKODONG-Manfaatkan lahan fasum yang produktif. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KPK-PPATK Jadi Pilot Project Gaji Tunggal

- Korpri dan P2G Setuju selama Tidak Kurangi Kesejahteraan ASN
- PPPK Bakal Dapat Pensiun, tapi Wajib Bayar Iuran Tiap Bulan

JAKARTA - Rencana pemerintah menerapkan skema *single salary* atau gaji tunggal kian matang. *Pilot project*-nya pun telah berjalan di dua lembaga negara, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). ▶ Baca *KPK...*, Hal 11

Selama masih dicoba di KPK dan PPATK, tunjangan yang selama ini ada masih berlaku. Misalnya tunjangan kinerja. Karena untuk membedakan mana yang kerja dan yang tidak kerja. Daerah kemampuannya juga berbeda-beda."

ABDULLAH AZWAR ANAS
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB)

Jawa Pos

KPK-PPATK Jadi Pilot Project Gaji Tunggal

Sambungan dari hal 1

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, dua lembaga tersebut dipilih sebagai *pilot project* lantaran dinilai banyak membutuhkan dukungan kinerja yang baik dan integritas tinggi. Lewat percobaan penerapan di dua lembaga itu, kata dia, akan terlihat dampak dari pemberlakuan gaji tunggal ini.

Termasuk mengenai kekhawatiran banyak pihak soal adanya ketidakadilan. Misalnya, aparat sipil negara (ASN) berkinerja baik akan mendapat gaji yang sama dengan mereka yang kerjanya buruk. "Ini yang sedang di-*pilot project*-kan. Nanti kita evaluasi," ujar Anas sesuai konferensi pers penetapan hari libur 2024 di Kemenko PMK kemarin (12/9). Namun, yang pasti, lanjut Anas, sistem ini nantinya akan menghapus honor-honor di luar gaji pokok. Tak terkecuali honor perjalanan dinas dan lainnya. Nanti kebijakan ini akan diatur melalui peraturan pemerintah (PP).

Lebih lanjut Anas menekankan, selama masih diujal di KPK dan PPATK, tunjangan

yang selama ini ada masih berlaku. Misalnya tunjangan kinerja. "Karena untuk membedakan mana yang kerja dan yang tidak kerja. Daerah kemampuannya juga berbeda-beda," ucapnya.

Mantan bupati Banyuwangi itu mengakui, ada dampak negatif dari skema tunjangan kinerja. Dia menemukan ada ASN yang mengatur perjalanan dinas atau rapat di luar kota hanya untuk mendapat tunjangan perjalanan dinas.

Anas menerangkan, dalam RUU ASN, skema kesejahteraan akan menjadi perhatian. Itu penting untuk menguatkan sistem penggajian ASN. Terkait pajak, dia menyebutkan bahwa sejauh ini belum ada pembicaraan. Sebab, semua masih dikaji. "Belum bahas di situ (pajak)," katanya. Mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), Anas menjelaskan bahwa mereka bakal mendapat pensiun. Namun, akan ada kewajiban membayar iuran jaminan pensiun.

Sementara itu, rencana penerapan *single salary* untuk pegawai negeri sipil (PNS) mendapatkan banyak respons. Ada yang setuju, tapi banyak juga yang mengkritisi. Ketua Korps Pegawai

Republik Indonesia (Korpri) Zudan Arif Fakrulloh menyatakan persetujuannya atas rencana tersebut. Sistem itu memang sudah dibicarakan antara pemerintah dan jajarannya. "Iya (setuju), itu sudah lama dibahas dan disampaikan oleh Korpri dalam berbagai kesempatan," ujarnya.

Yang terpenting, lanjut Zudan, sistem baru tersebut tidak memangkas kesejahteraan pegawai. Sebaliknya, harus lebih baik. "Harus *single salary system* yang menyejahterakan," tegasnya. Dia menambahkan, jika sistem baru tidak lebih menyejahterakan, akan muncul potensi terjadinya gejolak. "Sepanjang menambah kesejahteraan ASN, sistem ini pasti diterima," tambahnya.

Pada bagian lain, Koordinator Nasional Organisasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, pemerintah seharusnya membuat kajian akademik terlebih dahulu soal aturan tersebut. Kemudian, kajian itu disosialisasikan ke pemangku kebijakan terkait. Termasuk organisasi profesi guru. Sebab, di antara sekian banyak ASN, profesi guru merupakan yang cukup besar. Pada prinsipnya, tutur Sa-

trivan, pemberlakuan sistem gaji tunggal tidak boleh bertentangan dengan aturan yang sudah ada. Misalnya UU 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). UU tersebut mengatur bahwa manajemen ASN didasarkan pada asas berkeadilan, tidak diskriminasi, ada kepastian hukum, dan kesejahteraan. Di kalangan guru sendiri, beber Satriwan, belum ada informasi yang lengkap soal skema gaji tunggal tersebut. Para guru ASN atau PNS masih penuh tanya. Apakah tunjangan-tunjangan yang selama ini melekat pada gaji bakal dihapus atau sekadar dihilangkan penamaannya.

Satriwan mencontohkan seorang guru PNS yang menerima gaji pokok Rp 3 juta. Kemudian, aneka tunjangan mencapai Rp 4 juta. "Jadi, total *take home pay*-nya Rp 7 juta. Ini belum termasuk tunjangan profesi guru yang jumlahnya signifikan," ungkapnya.

Nah, yang jadi pertanyaan, pada skema *single salary* nanti, guru PNS tersebut apakah tetap menerima penghasilan Rp 7 juta atau hanya gaji pokok Rp 3 juta? Jika nanti yang diterima gaji pokok saja, artinya sistem *single salary* tidak sesuai

dengan prinsip kesejahteraan di UU ASN. Tetapi, jika yang diterima guru tetap Rp 7 juta, artinya tidak ada persoalan. Hanya nomenklatur tunjangan-tunjangan yang dihapus. Angka atau uangnya tetap ada. "Syukur-syukur bisa dinaikkan," katanya.

Satriwan menekankan bahwa *take home pay* guru PNS selama ini sangat beragam komponennya. Selain tunjangan yang melekat dan berlaku secara nasional, ada juga tunjangan kinerja daerah. Tunjangan ini berbeda dengan tunjangan profesi guru. Dia menyatakan, dengan skema gaji tunggal nanti, tunjangan-tunjangan tersebut harus tetap ada.

Khusus soal tunjangan profesi guru, Satriwan menegaskan, itu adalah amanat dari UU Guru dan Dosen. Tidak bisa dihilangkan ha-

nya karena peraturan menteri atau sejenisnyanya. Tunjangan tersebut diberikan kepada guru-guru yang memenuhi syarat. Di antara syaratnya adalah harus sudah memiliki sertifikat profesi guru.

Kenaikan Gaji ASN dan TNI-Polri

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah menyambut baik rencana kenaikan gaji ASN beserta TNI-Polri dan pensiunannya. Rencananya, kata dia, banggar bersama pemerintah akan membahas usulan kenaikan gaji itu pada rapat 19 September 2023. Menurut Said, kenaikan 8 persen gaji ASN, TNI, dan Polri serta 12 persen untuk pensiunan telah mempertimbangkan kekuatan fiskal 2024. Hal tersebut diharapkan memperkuat keberlangsungan fiskal yang sehat.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) itu menyatakan, kenaikan gaji tersebut tidak berdampak signifikan pada inflasi. Said berharap kenaikan gaji dapat meningkatkan kesejahteraan ASN, TNI, Polri, dan para pensiunan. Terlebih, selama empat tahun terakhir, mereka semua tidak mendapatkan kenaikan gaji.

Padahal, setiap tahun Indonesia menghadapi kenaikan inflasi. "Sehingga kenaikan ini kita harapkan bisa menjadi kesempatan mereka untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik," kata Said.

Selain itu, kenaikan gaji diharapkan meningkatkan tingkat konsumsi rumah tangga. Pada akhirnya, kesejahteraan yang meningkat akan berimbas pada peningkatan etos kerja dan semangat berkarya. (mia/lyn/far/wan/lum/c9/oni)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO






PEKAN OLAHRAGA PROVINSI (PORPROV) VIII JAWA TIMUR 2023 DI KABUPATEN SIDOARJO



Sumbang 15 Medali, Tim Cabor Berkuda Raih Juara Umum

KOTA-Tim cabang olahraga (cabor) berkuda Sidoarjo berhasil menjadi juara umum pada gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII 2023. Total cabor tersebut berhasil meraih 15 medali. Yakni, 8 emas 4 perak dan 3 perunggu.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Dispora) Sidoarjo, Djoko Supriyadi bersyukur tim berkuda Kota Delta meraih hasil positif. Menurutnya, hal itu sangat membanggakan.

Tim berkuda, termasuk cabor yang diandalkan Kabupaten Sidoarjo dalam mendulang pundi medali. "Cabang olahraga

● Ke Halaman 10

Tumbangkan Surabaya, Tim Voli Pantai Sidoarjo Raih Medali Emas

KOTA-Satu lagi medali emas berhasil diamankan kontingen Sidoarjo di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jatim VIII 2023. Kali ini medali emas dipersembahkan oleh tim voli pantai putra.

Di partai final, Sidoarjo ditantang tim voli pantai putra Kota Surabaya. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Sidoarjo tampil percaya diri. Tim Kota Delta tampil dengan perkasa. Mereka menang dua set langsung. Sehingga berhasil meraih medali emas di cabang olahraga tersebut.

Di set pertama, pasangan Danang Herlambang dan Wahyu Wijaya menang telak dengan

● Ke Halaman 10



BERSAING: Atlet berkuda saat bertanding di Porprov.



KETAT: Tim voli pantai putra Sidoarjo saat melawan Surabaya.



Sumbang 15 Medali,...

berkuda ini memang salah satu andalan kita untuk meraih medali dalam Porprov," ucapnya.

Atas hasil yang positif tersebut, Djoko pun angkat topi untuk tim cabor berkuda. Tidak hanya itu, ia juga akan memberikan banyak bonus untuk atlet dan official. "Untuk para atlet cabor berkuda ini bonus dari Pemkab telah menanti," ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (Pengcab Pordasi) Sidoarjo Zahrul Yussar mengapresiasi atas raihan atlet berkuda. Menurutnya atlet sudah menunjukkan kemampuan terbaiknya.

"Patut untuk kita apresiasi mereka sudah maksimal dengan perolehan medali yang cukup banyak," terangnya.

Sebagai tuan rumah, imbuhnya, atlet berkuda Sidoarjo membutuhkan bimbingan untuk terus meningkatkan kemampuannya. Sebab, baginya, masih banyak hal yang harus diperbaiki.

Meskipun begitu, ia tetap bersyukur dengan hasil yang didapat tim atlet berkuda Sidoarjo. "Tapi Alhamdulillah kita pasti dapat meraih juara umum," ucapnya.

Berkuda merupakan cabor yang baru masuk gelaran Porprov. Dan di Porprov VIII 2023 ini Sidoarjo menjadi tuan rumah pertama karena memiliki venue berkuda lengkap. (sai/vga)

Tumbangkan Surabaya,...

skor 21-15. Set kedua menjadi tegang pada saat Surabaya mampu mengimbangi permainan impresif Sidoarjo. Meski begitu skor 22-20 untuk keunggulan Sidoarjo.

Danang menyampaikan, kemenangan yang diraih merupakan hasil kerjasama tim.

"Kami punya tim yang cukup optimis, maksudnya gimana caranya kita jangan sampai mikir diri sendiri," ucapnya.

Di awal pertandingan, ia mengaku cukup kesulitan meladeni permainan tim Kota Pahlawan. Hingga akhirnya ia mampu menemukan titik lemah tim lawan.

"Awalnya tadi kami sempat kesulitan di menit awal babak pertama, akhirnya

pelan-pelan kita menemukan ritmenya," ujarnya.

Sementara itu, Manager tim voli pantai Sidoarjo, Bambang Eko Suhartawan mengatakan, keberhasilan tim voli pantai putra Sidoarjo merupakan hasil dari evaluasi pada Porprov tahun 2022 lalu. "Yang kita prediksi dan kita evaluasi sudah dijalankan dengan baik," katanya. (sai/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



ANTISIPASI BANJIR: Kondisi Sungai Mangetan Kanal yang telah dikeruk sebagian kemarin (12/9). Jelang musim hujan, Pemkab Sidoarjo menormalisasi beberapa sungai. DIMAS MALLANA, JAWA POS

Bersihkan Gorong-Gorong di Bawah Perempatan Gedangan

SIDOARJO - Menjelang musim hujan, Pemkab Sidoarjo bersiap-siap. Pembersihan drainase dilakukan agar tak terjadi banjir di beberapa tempat. Salah satunya, normalisasi Mangetan Kanal di Gedangan. Normalisasi dilakukan sekitar 200 meter dari barat kantor Kecamatan Gedangan di Desa Keboan Sikep hingga ke timur di Jalan Raya Wedi, Desa Wedi.

Kabid Ketersediaan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Sidoarjo Suprayitno

mengatakan, selain pembersihan rutin, ada program normalisasi. Sedimen di dasar sungai diangkat. Pinggiran sungai juga dirapikan sehingga tidak ada sampah maupun sedimen yang mengganggu aliran air.

"Sisi barat sudah selesai dinormalisasi. Mulai barat kantor Kecamatan Gedangan," kata Prayit. Di sisi timur Jalan Raya Wedi, normalisasi juga hampir selesai. Normalisasi masih terus berlangsung. Akhir tahun proses normalisasi

rampung. Prayit menyebut normalisasi hanya dilakukan saat malam. "Kami kerjakan mulai pukul 20.00 sampai 04.00 agar alat berat tidak sampai mengganggu arus lalu lintas," katanya. Sebab, di titik tersebut volume kendaraan sangat padat.

Selain penuntasan di sisi timur, petugas menyelesaikan normalisasi gorong-gorong di bawah Jalan Ahmad Yani, Gedangan. Tepatnya, gorong-gorong yang berada di bawah perempatan Gedangan. Panjangnya 175 meter dari barat ke timur. "Sungai

Mangetan Kanal ini melewati bawah perempatan Gedangan. Kondisinya kotor, banyak endapan sehingga butuh pembersihan," ujarnya.

Prayit menyebut normalisasi di sana dilakukan dengan alat seperti jaring untuk mengeruk sedimen maupun sampah yang ada di dalam gorong-gorong. "Kami tidak berani sampai memasukkan pekerja ke dalam, jadi hanya menggunakan alat secara manual," katanya. Normalisasi dilakukan setiap hari. Targetnya, November mendatang sudah tuntas. (uzi/c7/any)

Jawa Pos

Waspada, dalam 4 Hari, Terjadi 5 Kebakaran

Kemarin Api Hanguskan Bekas Warung Kopi di Taman

SIDOARJO - Lagi-lagi jago merah merajalela di Sidoarjo. Kali ini api menghanguskan sebuah kios semipermanen di pinggir Jalan Geluran, Taman, sebelum *exit toll* Waru. Api yang membubung tinggi tersebut sempat memicu kemacetan di jalan raya sekitar sekaligus membuat pemilik lapak warkop di sekitar lokasi ketakutan.

Sunarto, salah seorang warga sekitar, bersama warga lainnya langsung berupaya memadamkan api. Menurut pria 60 tahun itu, kebakaran terjadi sekitar pukul 11.00. "Saya awalnya hanya jaga warung punya adik. Kemudian lihat ada asap terus api, akhirnya langsung inisiatif cari air," ungkapnya.

Menurut Sunarto, rumah semipermanen tersebut ditinggali kakek 65 tahun bernama Sujiman seorang diri. "Dulu memang warung kopi dan nasi, tapi semenjak setahun ini



JADI ARANG: Bangunan semipermanen di Geluran, Taman, yang selama ini ditinggali kakek bernama Sujiman seorang diri habis dilalap api.

DIMAS MAULANA/JAWA POS

tutup karena Pak Sujiman kena stroke," ungkapnya. Saat api melahap tempat tinggalnya, Sujiman sedang keluar ke pasar diantar saudaranya. "Iya, pas sampai Pak Sujiman baru tahu sudah ludes *gini*," tuturnya.

Kurang dari 10 menit selepas mendapat laporan, mobil damkar sudah tiba di lokasi. Komandan Peleton Damkar Pos Waru Sutoyo mengatakan, ada tiga unit mobil damkar yang diturunkan. "Satu dari Pos Waru, dua lagi dari Pos Buduran. Karena info awal api cukup besar," ujarnya.

"Sekitar pukul 12.00 kurang sudah padam dan sisa pembasahan," katanya.

Sutoyo menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara itu, kerugian diperkirakan mencapai Rp 10 juta. "Untuk dugaan penyebab, kami limpahkan ke pihak kepolisian," imbuhnya. Menurut penuturan warga sekitar, diduga api berasal dari sisa anak kecil yang membakar sampah di dekat kios milik Sujiman.

Dengan kebakaran kemarin, total ada lima kebakaran dalam empat

hari terakhir. Yakni, kebakaran di Desa Semambung, Gedangan, pada Sabtu (9/9) dini hari. Dua rumah terbakar. Empat mobil damkar dikerahkan. Lalu, pada malam sekitar pukul 21.00 di Desa Kedungrejo, Waru, ada empat kamar kos yang terbakar. Dua mobil damkar dikerahkan.

Sementara itu, kebakaran lahan terjadi pada Senin (11/9) di lahan tebu wilayah Desa Bakungpringgodani, Balongbendo. Kemudian, kebakaran lahan kosong di Desa Sepande, Candi. Kedua kebakaran lahan juga terjadi pada pukul 21.00.

Dengan maraknya kejadian kebakaran sejak Agustus hingga minggu kedua September ini, Kabid Damkar BPBD Sidoarjo Muhammad Qodari mengimbau agar warga tidak sembarangan bermain api atau membuang sisa puntung rokok. "Untuk rumah warga, kebanyakan karena korsleting. Harus diperhatikan kelistrikannya, khususnya stopkontak yang menumpuk," tuturnya. (eza/c19/any)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Utamakan Perbaikan Layanan Kesehatan dan Pendidikan

Bupati Beri Jawaban dalam Rapat Paripurna tentang Perubahan APBD 2023

SIDOARJO - Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan APBD 2023 saat ini masih berlangsung. Kemarin (12/9) Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor hadir dalam rapat paripurna bersama DPRD Sidoarjo untuk memberikan jawaban atas

pandangan umum (PU) fraksi-fraksi terkait raperda tentang perubahan APBD tersebut.

Muhdlor menyebut isu yang harus menjadi perhatian bersama dalam perubahan APBD itu, antara lain, terkait pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan bidang aparatur pemerintahan, pembangunan bidang ekonomi dan keuangan daerah, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur daerah,

peningkatan pelayanan masyarakat, dan optimalisasi potensi pendapatan.

Soal isu di bidang kesehatan, salah satunya terkait dengan peningkatan pendapatan puskesmas. Muhdlor menyampaikan, pihaknya menaikkan pendapatan badan layanan umum daerah (BLUD) puskesmas. "Dari Rp 66 miliar menjadi Rp 70 miliar pada APBD perubahan," katanya. Pihaknya juga akan membuat *road map* kebutuhan lahan parkir di puskesmas. Sebab,

lahan parkir di sebagian puskesmas masih terbatas. Selain itu, beberapa alat *fogging* yang rusak milik puskesmas juga segera diperbaiki.

Di bidang pendidikan, pihaknya akan mempercepat perbaikan sekolah rusak. Proses perbaikan bisa dimulai di awal tahun. Sebab, saat ini belum semua sekolah diperbaiki. Ada sebagian yang masih proses lelang. "Kami lakukan perbaikan *time schedule* dengan memulai di awal tahun," katanya.

Sebab, proses perbaikan butuh waktu, mulai perencanaan, proses lelang, hingga pembangunannya.

Terkait infrastruktur, dalam perubahan APBD juga dibahas rencana penambahan material lampu penerangan jalan. Sebab, saat ini lampu pengganti sudah habis. Imbasnya, saat ada lampu penerangan jalan yang rusak, Dinas Perhubungan Sidoarjo tidak bisa mengganti dengan yang baru. Hanya bisa melakukan perbaikan.

Termasuk menambah jumlah tiang penerangan jalan umum (PJU).

Pih Sekretaris Daerah Sidoarjo Andjar Surjadianto menyebut sampai 2023 ini ada 34.713 titik lampu di Sidoarjo. Penambahan dilakukan secara bertahap. "Kami anggarkan bertahap tiap tahun terkait material listrik ini," katanya. Dalam perubahan APBD, material lampu jalan bakal ditambah sehingga lampu yang rusak bisa segera diganti. (uzi/c6/any)

Jawa Pos

Beberapa Stan MPP Padat, Pemkab Bakal Evaluasi



PELAYANAN: Suasana masyarakat yang memanfaatkan layanan di MPP Sidoarjo.

KOTA-Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melakukan evaluasi terhadap stan pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berlokasi di Jalan Lingkar Timur. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat yang datang ke MPP.

Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mencatat bahwa beberapa stan pelayanan di MPP Sidoarjo mengalami kepadatan pengunjung setiap harinya. Seperti stan pelayanan dari Dispendukcapil dan Dinas Penanaman Modal. Kedua stan itu terus melayani

masyarakat dengan intensitas tinggi.

Namun, ada juga stan pelayanan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi vertikal yang terbilang sepi. Alasan utamanya adalah keterbatasan petugas. Oleh karena itu, mereka meminta penambahan personil yang piket untuk memenuhi kebutuhan pelayanan.

Kabag Organisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Arif Mulyono mengungkapkan bahwa MPP Sidoarjo dibangun dengan tujuan agar masyarakat Sidoarjo dan umum dapat memperoleh berbagai macam layanan publik secara lengkap

di satu lokasi.

Hingga saat ini, MPP Sidoarjo menyediakan total 142 jenis layanan publik dari berbagai OPD dan instansi vertikal. Pemkab Sidoarjo memiliki 11 unit OPD, sedangkan instansi vertikal mencapai 13 unit.

Jumlah total petugas yang bertugas di MPP Sidoarjo mencapai 40 orang. Setiap stan layanan di MPP Sidoarjo memiliki minimal satu petugas, dengan maksimal hingga enam orang petugas.

Menurut dia, hingga saat ini ada 24 instansi masih aktif memberikan layanan di MPP Sidoarjo. Pihaknya berharap agar

semakin banyak instansi yang bergabung. "Sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik yang tersedia di satu tempat," katanya.

Pelayanan publik di MPP Sidoarjo dievaluasi setiap tahun sekali, sebagai upaya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Selain MPP, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga memiliki 110 unit pelayanan publik lainnya, yang tersebar mulai dari tingkat OPD, kecamatan, Kelurahan, hingga Puskesmas. Semua upaya ini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (nis/vga)



Ribut-ribut Fasos Wisma Tropodo Setelah Buat LP dan Ngadu ke Pemkab, Warga Laporkan Jaksa

Sidoarjo, Memorandum

Sengketa lahan fasilitas sosial (fasos) antara masyarakat perumahan Wisma Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, dengan Yayasan Al-Fallah Darusallam belum menemukan titik temu. Aduan warga ke Pemkab Sidoarjo dan kepolisian belum ada perkembangan.

Warga mengadu lantaran fasos tersebut dikuasai Yayasan Al-Fallah Darusallam. Lahan diubah fungsi ruang terbuka hijau menjadi bangunan gedung Sekolah Dasar Al-Fallah Darusallam.

Menurut warga dan Ketua RW 03 Wisma Tropodo, Dian dan Supriyadi, tanpa dasar yayasan mendirikan bangunan gedung sekolah dasar di atas lahan tanah yang bukan miliknya. Karena itu warga Wisma Tropodo tidak tinggal diam melakukan upaya hukum.

Dikatakan, warga sudah melaporkan ke Polda Jatim. Aduan warga terakhir dilimpahkan ke Polresta Sidoarjo. Warga juga sudah mengadu ke Pemkab Sidoarjo.

Warga juga akan melaporkan ke Kejaksaan terkait masalah ini. Sebab ada dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh oknum pejabat sehingga fasos Wisma Tropodo berubah jadi gedung SD dan dilengkapi surat.

Diberitakan harian ini sebelumnya, penguasaan hak guna bersama fasilitas sosial (fasos) Perumahan Wisma Tropodo, Waru, Sidoarjo sampai saat ini belum menemukan titik temu, antara Yayasan Al-Fallah Darusallam dan warga Wisma Tropodo. Faktanya, fasos itu kini sudah berubah jadi gedung sekolah dan warga terus mempertanyakan perubahan fasos ini.

Warga bahkan mengadukan perubahan fasos jadi gedung sekolah ke Pemkab dan Polda Jatim.



Pemkab Sidoarjo ketika menerima pengaduan warga Wisma Tropodo.

Aduan warga dilayangkan warga dan Ketua RW 03 Wisma Tropodo, Desa Tropodo, Kecamatan Waru, Supriyadi.

Aduan warga ke Pemkab direspon oleh Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang yang berjanji akan membongkar bangunan sekolah di atas fasos tersebut.

Sementara, aduan warga ke Polda Jatim dilimpahkan ke Polresta Sidoarjo. Sampai ini warga masih menunggu langkah polisi merespon pengaduan warga tersebut.

Menurut salah satu warga RW 03 Wisma Tropodo, Dian, Yayasan Al-Fallah Darusallam mempunyai SK Bupati dan sampai saat ini SK Bupati tersebut belum pernah ditunjukkan kepada warga Wisma Tropodo. "Ada apa dengan SK Bupati tersebut kok sampai saat ini dirahasiakan?" ujarnya.

Yang jadi pertanyaan warga, lanjut dia, dari mana pihak yayasan memperoleh SK tersebut? Pihak yayasan diduga juga tidak mengantongi izin mendirikan bangunan, tetapi tetap mendirikan bangunan gedung.

Satu hal lagi, lanjut warga; aturan izin mendirikan sekolah menengah pertama dilarang berada di dalam kompleks perumahan juga dilanggar oleh pihak yayasan.

Pihak yayasan berani mendi-

rikan sekolah menengah pertama di dalam kompleks perumahan, tapi yang cukup disayangkan kenapa pemerintah daerah tidak berani menindak dan mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yayasan. Padahal bukti sudah jelas adanya perubahan ruang terbuka hijau dan adanya bangunan sekolah menengah pertama di dalam kompleks Perumahan Wisma Tropodo.

Ketua Yayasan Al-Fallah Darusallam, Tri Warsono saat dikonfirmasi pada 19 Mei 2023 di kantor Yayasan Al-Fallah Darusallam yang berada di Wisma Tropodo menyatakan, pihaknya memang menguasai dan mengomersilkan fasos Wisma Tropodo. Karena sekolahnya adalah sekolah swasta. Kalau dibongkar, pihaknya tidak terima, karena memiliki SK Bupati. Yakni, SK Bupati nomer 106 tahun 1998.

Sementara Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Sidoarjo Ir H Bachruni Aryawan MM dikonfirmasi pada 12 Mei 2023 mengatakan akan menindaklanjuti pengaduan warga ini. Pihaknya juga akan melakukan pembongkaran bila ditemukan pelanggaran berupa penyalahgunaan peruntukan fasos. (arf/jok/day)

Warga Sepande Diminta Tenang

Sawah Gogol Terdampak Proyek Perumahan

Sidoarjo, Memorandum

Warga gogol Desa Sepande, Kecamatan Candi, diimbau tenang dan tidak termakan isu-isu yang tidak benar. Imbauan ini disampaikan Kepala Desa (Kades) Sepande Hadi Santoso terkait sawah warga yang terdampak urugan pengembang perumahan.

Kades Sepande Hadi Santoso mengatakan, sudah ada kesepakatan antara warga gogol dengan pelaksana proyek pengembang perumahan PT Kali Dana di Desa Sepande. "Makanya saya berharap warga tenang. Jangan sampai membuat isu atau terpancing isu yang tidak benar," pinta kades.

Dikatakan, pihaknya sudah melangkah sesuai dengan atur-

an. "Insya Allah bulan ini PT Kali Dana akan melaksanakan janjinya untuk membangun gorong-gorong saluran air," jelas kades.

Warga Sepande berinisial Al mengatakan, tidak ada kejelasan kompensasi dari PT Kali Dana untuk membuat gorong-gorong. Makanya kini warga gogol bergejolak karena saluran air sawah mereka terdampak urugan pengembang.

Ketua LSM Satria, Makin Suganda mengatakan, di Sepande ada 90 warga gogol yang saluran air sawahnya terkena dampak urugan proyek pengembang perumahan. Hingga kini tuntutan 90 warga gogol desa itu belum direspons pengembang perumahan. "Ini



Kades Sepande Hadi Santoso.

adalah persoalan sederhana yang harus diselesaikan. Pengembang perumahan lebih baik segera melakukan pembangunan gorong-gorong sesuai kesepakatan. Apa susahny

membuat gorong-gorong untuk menyalurkan air ke sawah warga," kata dia.

Hal itu disampaikan karena saat ia meninjau ke lokasi, memang benar saluran itu tersumbat urugan proyek perumahan. Masyarakat sudah berkorban banyak bagi suksesnya proyek pengembangan perumahan tersebut. Kini saatnya pengembang sebagai pelaksana proyek untuk memberikan kontribusi bagi masyarakat.

PT Kali Dana melalui Cecep yang ditunjuk di lapangan mengatakan, terkait pembangunan gorong-gorong untuk saluran air, dalam bulan ini akan dibangun. "Saya harap warga Sepande tenang. Jangan sampai ada kecurigaan kepada pihak desa maupun pihak PT Kali Dana," pinta Cecep. (yud/jok/day)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

SDC Bantu UMKM Sidoarjo Naik Kelas

SURABAYA PAGI, Sidoarjo - Pemkab Sidoarjo, bersama Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) setempat, membantu pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas salah satunya melalui Skill Development Center (SDC) yang diikuti oleh 32 orang peserta.

Asisten I Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman di Surabaya, Selasa mengatakan, saat ini Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengembangkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas berkarakter.

"Diharapkan dengan kegiatan ini dapat mengoptimalkan sumber daya manusia guna menggerakkan perekonomian lokal serta memperluas penciptaan lapangan kerja," katanya di sela pembukaan lokakarya di salah satu hotel di Surabaya.

Ia mengatakan, ada beberapa strategi yang terus dilakukan oleh Pemerintah

tersebut dalam rangka peningkatan produktivitas," ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Sidoarjo juga merancang strategi dan kebijakan yang mendorong UMKM naik kelas mulai dari tingkat keluarga hingga negara.

"Kemudian memberikan informasi sekaligus pengetahuan kepada seluruh peserta sesuai bidang yang mereka tekuni dan bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang berkualitas berkarakter dan berdaya saing" tuturnya.

Kepala BPVP Sidoarjo Muhammad Aiza Akbar mengatakan SDC ini merupakan sebuah terobosan bersama melalui kolaborasi antarinstansi untuk meningkatkan jumlah masyarakat yang bekerja.

"Baik bekerja dalam hubungan kerja maupun bekerja sebagai pemilik usaha," ucapnya.

Ia mengatakan, SDC Kabupaten Sidoarjo ini memilih untuk menciptakan wirausaha baru karena dengan menciptakan wirausaha baru, maka akan ada masyarakat yang multibayar.

Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM, salah satunya memberikan stimulus untuk menumbuhkan dunia usaha guna memperluas lapangan kerja dan dapat menurunkan jumlah pengangguran.

"Hal ini sebagai salah satu bentuk ikhtiar dalam mengembangkan sumber daya manusia yang berkompe-

akan menciptakan multiplier effect dengan terserapnya tenaga kerja pada usaha-usaha baru tersebut.

Selain itu, juga memberikan pembekalan legalitas usaha. Sehingga hasil pelatihan SDC ini, adalah unit-unit usaha baru yang telah siap dari sisi kemampuan teknis, legalitas usaha, serta siap memanfaatkan peluang besar dari system e-commerce. ■ Sd-01 ham

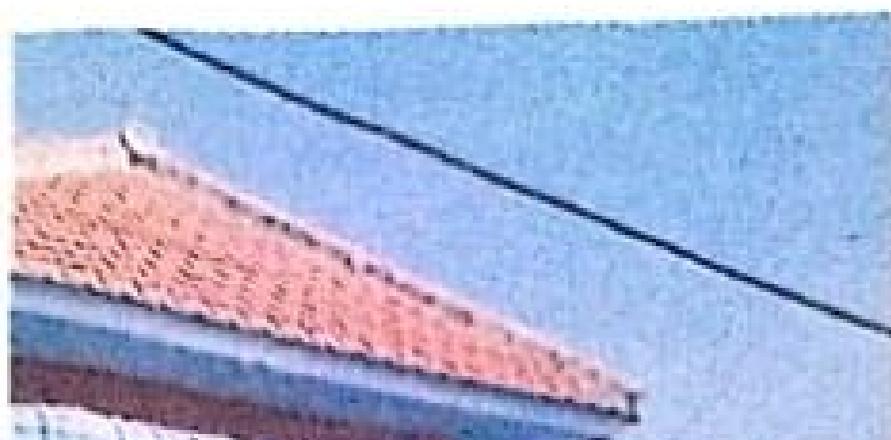


SP/SDA

Penyerahan sertifikat kepada pelaku UMKM usai mengikuti Skill Development Center (SDC) yang diselenggarakan oleh Pemkab Sidoarjo.



DELT PUNYA



**DARI
TANAMAN:
Kantor Desa**



AHMAD REZA/ANNA POS

nama...
Waung
kemarin.
Konon,
namanya
berasal dari
sebutan
untuk
tanaman
puyengan.

Tempat Bertapa Prajurit pada Masa Kerajaan

SIDOARJO - Salah satu desa di Krembung yang bernama Waung memiliki beberapa kisah. Mulai penamaannya hingga cerita tentang seorang prajurit pada masa Kerajaan Majapahit yang bertapa di lokasi tersebut.

Waung konon diambil dari nama sebuah tanaman yang banyak tersebar pada masa itu. Yakni, puyengan atau nama Latin-nya *Lantana camara*. Tanaman dengan bunga berwarna tersebut konon bisa mengobati banyak penyakit, khususnya kulit.

Kades Waung Sunarto mengungkapkan, memang dulu banyak tanaman puyengan di sekitar situ. Yang memberi nama Waung adalah sesepuh desa bernama Mbah Demang. Lalu, dilanjutkan dengan sesepuh lain bernama Mbah Surobangun. Tokoh terakhir ini yang dikeramatkan pada masa awal adanya Desa Waung.

Pada masa Mbah Surobangun, wilayah Waung

Pada masa itu, di lokasi ini banyak orang datang dan membangun, lalu didatangi banyak orang. "Hingga akhirnya seperti sekarang ini," katanya. Leluhur lain yang juga dihormati di wilayah Waung adalah Mbah Colopito. Konon, kabarnya Mbah Colopito ini merupakan seorang prajurit yang mencari tempat bertapa. Hingga akhirnya, dia menempati wilayah sisi barat dari Desa Waung untuk bertapa. Warga sekitar menyebutnya dengan Nepen Colopito. Mengenai prajurit yang mana, Sunarto tidak mengetahui pasti. "Tapi, banyak yang bilang jika berasal dari Majapahit jika lihat dari batu andesit yang konon jadi tempat duduk bertapa," jelasnya. Selain itu, di lokasi makam Mbah Colopito ditemukan beberapa artefak yang terbuat dari batu andesit kuno. Waung diketahui eksis menjadi sebuah permukiman sejak 1800-an jika dilihat dari arsip peta Belanda. (eza/c14/any)

Jawa Pos

Manfaatkan Lahan Fasum Jadi Produktif

SUKODONO-Manfaatkan fasilitas umum (fasum) yang menganggur, warga RW 9 Perum Graha Mutiara, Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono ubah menjadi lahan produktif. Dengan menggunakan nama Kampung Ibu Sayur Ikhlas, mereka bisa menghemat pengeluaran untuk membeli bahan makanan.

Pengelola Kampung Ibu Sayur Ikhlas, Muhamad Iqbal Harisudin mengatakan, frasa kata "Ibu" merupakan sebuah akronim dari kata 'Ikan dan Buah'. Sedangkan frasa Ikhlas diambil dari slogan "ambil secukupnya bayar seikhlasnya".

"Panen yang dihasilkan dari budi daya ikan, buah dan sayur dapat dinikmati warga sekitar, dengan harga seikhlasnya," ucapnya.

Sebelumnya, lahan tersebut merupakan fasilitas umum yang mangkrak dan penuh dengan sampah rumah tangga. Bahkan sampah seperti plastik dan kain sempat juga ditemui di tempat tersebut.

Karena hal itulah, Iqbal tergerak untuk mengubah lingkungannya menjadi lebih

bersih dan produktif. Ia memanfaatkan lahan yang teranggur itu dengan menanam sayur dan budi daya ikan. "Ada banyak, ada buah, sayur dan ikan konsumsi," jelasnya.

Terdapat empat jenis ikan, yakni lele, gurami, nila merah dan hitam. Dan berbagai jenis sayur dan buah seperti kangkung, bayam, terong, pepaya, anggur, kelengkeng hingga sirsak.

Tidak dipatoknya harga sayur di kampung tersebut, karena pengelolaan lahan itu dilakukan warga sendiri dengan gotong-royong. Sehingga dapat dikatakan dari warga, untuk warga sendiri. "Hasil dari penjualan hanya digunakan untuk biaya operasional," jelasnya.

Pada saat masa panen, imbuahnya akan diinformasikan ke warga melalui grup WhatsApp RW. Dari situlah pesanan akan dikelola.

Dia pun mencontohkan, saat panen hasil pemeliharaan ikan lele seberat 96 kg lalu, dia hanya mengirim pada pengurus RW yang kemudian diteruskan kepada grup ibu ibu.

"Misalnya pesan ikan lele,



INSPIRATIF: Muhammad Iqbal Harisudin saat mengecek tanaman cabai.

situ ada yang pesan 1 kg atau lebih. Ada yang memberi uang Rp 25 ribu maupun Rp 50 ribu tanpa minta kem-

balian," ceritanya.

Ke depan, Iqbal berencana mengembangkan tempat tersebut untuk menjadi wi-

sata edukasi. Tempat belajar memelihara ikan dengan baik hingga budi daya tanaman dengan baik. (sai/vga)



Menteri Anas Pastikan Tak Ada Penghapusan Tenaga Honorer

Jakarta, Bhirawa

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas memastikan tidak akan ada penghapusan 2,3 juta tenaga honorer yang sebelumnya diusulkan akan dilakukan pada November 2023.

"Yang penting, nanti di November ini tidak akan ada PHK massal untuk 2,3 juta ini, karena kalau 2,3 juta ini ada pemberhentian seperti PP yang tadi, maka ini akan berdampak pada pelayanan publik dan lain-lain," ujar Azwar Anas di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.

Azwar khawatir jika terjadi penghapusan honorer berdampak pada setiap aspek pelayanan, termasuk tingginya angka pengangguran. Ia menyebut banyak pegawai honorer yang melayani sektor-sektor vital pelayanan publik.

Kendati demikian, pemerintah

tidak boleh mengangkat atau merekrut tenaga honorer baru. Ia pun telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah untuk tetap mengalokasikan anggaran bagi tenaga honorer untuk 2024.

"Nah formatnya seperti apa, finalnya kita bahas RUU ASN bulan depan sudah bisa kita sahkan," kata dia.

Nantinya, di RUU ASN, pengangkatan ASN tidak hanya setahun atau dua tahun sekali, tetapi bisa kapan saja untuk mengisi kekoson-

gan yang ditinggalkan, seperti pensiun.

"Jadi dengan demikian tak seperti selama ini, bila kosong, diisi honorer," katanya.

Ia bercerita selama ini banyak rekrutmen pegawai honorer yang berkualitas maupun tak berkualitas. Sehingga, ia memastikan bakal mengevaluasi soal honorer ke depannya.

"Terlepas dari rekrutmennya dulu banyak ada yang berkualitas bagus, ada juga yang tidak berkualitas, maka nanti ini akan kita evaluasi," katanya. [ant]



Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas di Istana Kepresidenan Jakarta